

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 telah menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Reformasi yang diharapkan dapat merubah kehidupan masyarakat justru berdampak negatif terhadap kestabilan negara. Kekuatan negara yang merosot telah memunculkan berbagai macam konflik baik itu konflik vertikal maupun konflik horizontal.

Konflik yang banyak ditemukan pada masa reformasi adalah konflik horizontal yang melibatkan sebuah masyarakat, organisasi, dan komunitas. Konflik yang muncul disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan identitas dan kepentingan masyarakat. Perbedaan identitas tersebut dapat meliputi suku, budaya, bahasa, dan agama, sedangkan perbedaan kepentingan dapat meliputi politik, ekonomi dan kekuasaan.

Lombok yang dikenal dengan pulau seribu masjid menjadi salah satu daerah yang rawan terjadi konflik. Dalam sejarahnya, konflik yang banyak terjadi di Lombok adalah konflik agama, seperti konflik antara masyarakat yang beragama Islam dan Kristen tahun 2000, konflik antara jamaah Ahmadiyah dengan masyarakat lokal tahun 2000, konflik antara kelompok Amfhibi dengan komunitas Hindu di Mataram tahun 1999 dan dengan masyarakat desa Perampauan di Lombok Barat tahun 2000, konflik LDII dengan masyarakat

lokal di Lombok Timur tahun 2002, dan konflik internal organisasi Nahdlatul Wathan tahun 1998.¹

Konflik internal Nahdlatul Wathan menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji, mengingat konflik yang sudah berlangsung lama dan belum menemukan titik terangnya. Sebagai organisasi massa dengan jumlah pengikut terbesar, Nahdlatul Wathan sampai saat ini masih terpecah kedalam dua kubu, yakni kubu Rauhun yang berpusat di desa Pancor dan kubu Raihanun yang berpusat di desa Ajani Kabupaten Lombok Timur.

Nahdlatul Wathan didirikan oleh Tuan Guru Hajji (THG) Muhammad Zainuddin Abdul Majid atau yang lebih dikenal dengan Maulana Syeikh pada tahun 1953 di Pancor, Lombok Timur. Jumlah warga NW di Lombok diperkirakan 2 juta orang sehingga ia memiliki peran penting dalam pembangunan civil society dan pemerintahan.² Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Wathan telah banyak memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Kontribusi Nahdlatul Wathan dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari jumlah pondok psantren yang banyak berdiri di Lombok.

Konflik Nahdlatul Wathan muncul setelah wafatnya TGH Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada tahun 1997. Kedua putri beliau, yakni Siti Rauhun (R1) dan Siti Raihanun (R2) saling berebut kekuasaan terkait siapa

¹ Saipul Hamdi, "Politik Islah: Re-Negosiasi Islah, Konflik, dan Kekuasaan dalam Nahdlatul Wathan di Lombok Timur", *Kawistara*, Vol. 1, No. 1 (April, 2011), h. 2.

² *Ibid.*

yang menggantikan posisi beliau, baik sebagai ketua Nahdlatul Wathan maupun sebagai pemain inti dalam dinamika politik di Lombok Timur.³

Mukhtamar NW ke 10 tahun 1998 di Praya Lombok Tengah menunjukkan kemenangan Raihanun sebagai pemimpin Nahdlatul Wathan selanjutnya. Kemenangan tersebut tidak diterima oleh kubu Rahun yang menilai hasil Mukhtamar tidak sah dan melanggar aturan organisasi. Adanya perbedaan pandangan terkait tafsir kepemimpinan perempuan dalam organisasi menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik Nahdlatul Wathan, dimana NW hanya menerapkan mazhab Syafi'i sebagai mazhab tunggal dalam menjalankan roda organisasi.

Pasca Mukhtamar Praya, masing-masing kubu mengklaim sebagai kelompok yang sah dan legitimate dan menyalahkan kelompok yang lain. Proses produksi dan reproduksi wacana dikonstruksi dan direproduksi melalui media agama yaitu pengajian. Wacana agama difungsikan sebagai pendukung dan penguat wacana kekuasaan yang diproduksi oleh keduanya. Apa yang dikatakan dan diwacanakan oleh elit NW menjadi 'kebenaran mutlak' yang diterima begitu saja oleh jama'ah NW. Wacana ini ibarat 'sabda' yang mempunyai kekuatan magis yang dapat membentuk dan mempengaruhi perilaku dan tindakan para jama'ah.⁴

³ Henk Schulte Nordholt, Gerry van Klinken, *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Soeharto Indonesia*, terj., Bernard Hidayat (Jakarta: KITLV, 2007), h. 380.

⁴ Saipul Hamdi, *Op. Cit.*

Setelah Nahdlatul Wathan pecah menjadi dua, masing-masing kubu terus berupaya memperkuat barisan, Rauhun membentuk barisan Satgas Hamzanwadi, sedangkan Raihanun membentuk barisan Hizbullah.⁵ Sampai saat ini, masyarakat di Lombok Timur masih terpecah kedalam dua barisan tersebut.

Perang wacana yang terjadi antara kedua kubu telah menjadi praktik konflik dan kekerasan antara pendukung. Wilayah-wilayah yang rawan konflik dan kekerasan adalah kecamatan Suralaga, Selong, Masbagik, Kota Raja, Wanasaba, Pringgasela, Pringgabaya, Suka Mulia, dan Aikmel. Kerusuhan pertama terjadi di Pancor pada tahun 1998 ketika pendukung Rauhun (R1) menyerang tokoh dari kubu Raihanun (R2). Yang menjadi target serangan kubu R1 diantaranya adalah TGH. Anas Hasyri, TGH. Mahmud Yasin, dan TGH. Tahir. Serangan demi serangan terus dilakukan oleh kubu R1 yang berakhir dengan hijrahnya kubu R2 dan pendukungnya dari Pancor ke desa Kalijaga kemudian ke desa Anjani.⁶

Hijrahnya kubu Raihanun (R2) tidak menjadi penyebab konflik mereda, tetapi justru menyebabkan perkembangan dan penyebaran konflik di desa-desa yang lain. Pada tahun 2000 terjadi kerusuhan antara kedua pendukung di desa Gotong Royong, Kecamatan Suralaga ketika pengajian kubu Rauhun (R1) berusaha digagalkan oleh kubu Raihanun (R2). Tidak ada korban jiwa dalam

⁵ Hernawardi, "Nahdlatul Wathan NTB di Bawah Tarikan Pancor dan Anjani", *Hajatan Demokrasi: Potret Jurnalistik Pemilu Langsung Simpul Islam Indonesia dari Moderat hingga Garis Keras*, ed., Asriri S. Karni (Jakarta: PT Era Media Informasi, 2006), h. 60.

⁶ Saipul Hamdi, *Op. Cit.*, h. 7.

peristiwa ini, hanya beberapa orang terluka. Ditahun yang sama juga terjadi kerusuhan di desa Kesik, Kecamatan Masbagik ketika kedua jama'ah NW saling menghadang dan menggagalkan pengajian. Kerusuhan ini menyebabkan puluhan orang terluka akibat saling melempar dengan batu dan senjata tajam.⁷

Sepanjang tahun 2000-2001 terjadi aksi saling serang di beberapa desa sehingga menimbulkan kerusakan rumah seperti di desa Kelayu, dusun Majuet, dan Kota Raja. Pada tahun 2002 terjadi perang besar antara kedua pendukung di desa Wanasaba. Kubu R2 mengadakan pengajian, tetapi digagalkan oleh kubu R1 sebagai aksi balasan atas serangan pengajian sebelumnya. Menurut catatan kepolisian 4 orang meninggal dunia dan puluhan orang terluka.⁸

Kerusuhan Wanasaba merembet ke desa-desa yang lain termasuk desa Paok Lombok, Borok Tumbuh, dan desa Tebaban. Korban dalam kerusuhan di desa-desa tersebut adalah 4 orang meninggal dunia, ratusan rumah dibakar dan dirusak, dan ratusan orang mengungsi ke desa lain. Kerusuhan di Paok Lombok disebabkan keinginan tokoh dari kubu R2 untuk mengadakan acara Maulid di Masjid, tetapi tidak diberikan izin oleh tokoh-tokoh R1 sehingga masa dari kedua kubu bentrok. Kerusuhan ini melibatkan desa-desa tetangga seperti Dusun Majuet, Dusun Borok Tumbuh dan Desa Tebaban.⁹

Konflik Nahdlatul Wathan terus berkembang bahkan sampai pada ranah politik. Khittah Nahdlatul Wathan sebenarnya tidak berafiliasi kepada salah

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, h. 8.

⁹ *Ibid.*

satu organisasi politik dan organisasi sosial kemasyarakatan manapun, namun dalam praktiknya khittah ini berbeda karena NW sejak berdiri telah aktif dikegiatan politik praktis. Pada pemilu pertama 1950, pendiri NW aktif di Partai Masyumi dan pernah menduduki jabatan Penasehat Partai Masyumi pada tahun 1952. Setelah Mayumi dibubarkan dia ikut membentuk Parmusi bersama tokoh-tokoh dan ormas lain. Sejak Orde Baru muncul, NW bergabung dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Golkar, dan pada tahun 1970 NW secara resmi bermitra dengan partai Golkar.¹⁰

Selama terjadinya konflik dan perpecahan, masing-masing kubu terus bersaing dan berkompetisi untuk menunjukkan siapa yang paling baik dalam mengelola Nahdlatul Wathan. Persaingan tidak hanya ditunjukkan dalam bidang pendidikan, tetapi persaingan telah menyebar ke ranah politik. Kedua kubu terus membangun relasi politik dengan tujuan tercapainya kepentingan-kepentingan organisasi.

Pada pemilu 1999 kubu Rahun (R1) bergabung dengan Partai Daulat Rakyat (PDR), sedangkan kubu Raihanun (R2) memilih tetap bersama partai Golkar.¹¹ Pada pemilu 2004, NW Anjani menyatakan diri mendukung Partai Bintang Reformasi (PBR) dan NW pancor menyatakan aspirasi politiknya disalurkan ke Partai Bulan Bintang (PBB). Pada pemilu presiden putaran pertama NW Anjani menginstruksikan kadernya untuk merapat kepasangan

¹⁰ *Ibid.*, h. 3-4.

¹¹ *Ibid.*, h.4.

Amin Rais-Suswono, dan pada putaran kedua merapat pada pasangan Mega-Hasyim sesuai dengan perintah DPP PBR. Berbeda dengan NW Anjani, NW Pancor menginstruksikan kadernya untuk mendukung Susilo Bambang Yudhono pada pemilu presiden putaran pertama. Hasil pemilu menunjukkan bahwa pasangan SBY-JK memenangkan pemilu di Pancor dengan jumlah suara 5.501 sedangkan perolehan suara Mega-Hasyim hanya mencapai 546. Di Anjani, pasangan Mega-Hasyim menang dengan jumlah suara 2.565, tetapi belum mampu mengalahkan popularitas SBY yang meraih 2.889 suara.¹²

Kedua partai afiliasi NW yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Bintang Reformasi (PBR) selalu masuk tiga besar dalam perolehan suara ditingkat lokal. Perolehan suara dari kedua partai ini pada pemilu 2009 tidak mencapai Parliamentary Threshold (PT) sehingga pada pemilu 2014, baik NW Anjani maupun NW Pancor sama-sama merubah haluan politiknya yakni NW Pancor berafiliasi dengan partai Demokrat, sedangkan NW Anjani berafiliasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Hanura.¹³

Berbeda dengan konflik-konflik lain di Indonesia yang telah mengalami proses rekonsiliasi, konflik Nahdlatul Wathan sampai saat ini belum juga menemukan tanda-tanda akan adanya rekonsiliasi dari kedua kubu. Ada

¹² Hernawardi, *Op. Cit.*, h. 62-63.

¹³ Saipul Hamdi, *Nahdlatul Wathan di Era Reformasi: Agama, Konflik dan Peta Rekonsiliasi* (Yogyakarta: KKS Yogyakarta, 2014), h. ix, seperti dikutip oleh Fandy Abdurrahman, "Dinamika Nahdlatul Wathan Lombok Timur dalam Pemilu Pasca Era Orde Baru sampai Pemilu 2014" (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015), h. 4.

beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kegagalan rekonsiliasi pada konflik Nahdlatul Wathan, diantaranya ialah adanya keinginan elit-elit NW untuk mempertahankan konflik demi menjaga kekuasaan disemua ranah. Selain itu, peran pemerintah daerah yang tidak netral menjadi penyebab sulitnya perdamaian diantara kedua kubu, misalnya Bupati Lombok Timur M. Sahdan yang lebih condong pada kubu Rahun, dan mantan Bupati setelahnya yang saat ini kembali menjabat yakni Ali Bin Dahlan yang lebih condong ke kubu Raihanun.¹⁴

Pada tahun 2010, konflik Nahdlatul Wathan telah mengupayakan adanya perdamaian, namun upaya tersebut dinilai syarat dengan kepentingan politik, dimana pada saat itu, putra Raihanun mencalonkan diri sebagai calon Bupati Lombok Tengah periode 2010-2015. Untuk memenangkan pilkada, putra Raihanun harus mendapatkan dukungan penuh dari seluruh jama'ah NW baik dari kubu Rahun maupun kubu Raihanun. Hasil pilkada menunjukkan bahwa putra Raihanun yakni Gede Sakti kalah dalam pilkada Lombok Tengah. Kekalahan ini kemudian menyebabkan upaya perdamaian gagal dan sampai saat ini kedua kubu masih berjalan sendiri-sendiri.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konflik Nahdlatul Wathan terbagi kedalam empat tahapan konflik, yaitu diskusi, polarisasi, segregasi dan destruksi. Diskusi merupakan tahap dimana terdapat perbedaan pendapat antara kedua belah pihak. Polarisasi merupakan tahap dimana kedua

¹⁴ Saipul Hamdi, *Op.Cit.*, h. 9.

belah pihak mulai memberikan jarak, menarik diri, dan menjauh satu sama lain. Segregasi menunjukkan tahap ketika kedua belah pihak saling menjauh dan komunikasi hanya terbatas pada ancaman. Dan tahap terakhir yaitu destruksi yang merupakan tahap permusuhan yang sepenuhnya antara kedua belah pihak.

Konflik Nahdlatul Wathan sampai saat ini menjadi konflik berkepanjangan dan sulit untuk dicarikan solusi. Organisasi Nahdlatul Wathan yang keberadaannya diharapkan mampu membuat kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik justru berbanding terbalik. Keberadaan NW pasca Maulana Syeikh telah menyebabkan masyarakat terpecah menjadi dua, bahkan telah menyebabkan pertikaian antar masyarakat.

Dalam ranah politik, kedua kubu terus saling beradu dengan membangun relasi-relasi politik. Pemilihan umum baik nasional maupun lokal menjadi ajang penentuan siapa yang paling baik. Setiap pendukung dari masing-masing kubu dihibau untuk memilih calon berdasarkan afiliasi politik dari kedua kubu. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh konflik Nahdlatul Wathan terhadap perilaku politik masyarakat. Penelitian ini penulis laksanakan di tempat yang menjadi pusat perkembangan NW pasca Maulana Syeikh, yakni di desa Pancor dan desa Anjani.

1.2. RUMUASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengaruh konflik Nahdlatul Wathan terhadap perilaku politik masyarakat Lombok Timur?”.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah untuk melihat pengaruh konflik Nahdlatul Wathan terhadap perilaku politik masyarakat Lombok Timur.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dalam kajian perilaku politik di Indonesia pada umumnya dan perilaku politik di Lombok Timur pada khususnya.

2. Manfaat Empiris

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konflik Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan pengaruhnya terhadap perilaku politik masyarakat Lombok Timur.

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam berbagai studi mengenai konflik Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan pengaruhnya terhadap perilaku politik masyarakat.

1.5. KERANGKA DASAR TEORI

1.5.1. Konflik

a. Pengertian Konflik

Konflik berasal dari bahasa Latin, *confligere* yang berarti benturan. Dalam kamus *the Collins Concise* sebagaimana yang dikutip oleh Gunaryo menjelaskan bahwa konflik adalah “*a struggle between opposing forces*”. Selain itu konflik juga diartikan sebagai “*opposition between ideas, and/or interests*”. Dengan demikian menurut kamus tersebut konflik dapat berbentuk fisik dan bisa pula berbentuk wacana.¹⁵

Konflik adalah sesuatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan.¹⁶ Menurut Lawang¹⁷, konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan

¹⁵ Achmad Gunaryo, *Konflik dan Pendekatan Terhadapnya*, dalam buku M. Mukhsin Jamil, (ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007), h. 31, seperti dikutip oleh M. Sahlan Hanafi, dkk., *Konflik Pemekaran Wilayah di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Pasca Perjanjian Helsinki*, *Jurnal Walisongo*, Vol. 21, No. 1 (Mei, 2013), h. 221.

¹⁶ Simon Fisher, *et al.*, *Working with Conflict: Skill and Strategies for Action*, terj., S.N. Kartikasari (Jakarta: The British Council, 2001), h. 4.

¹⁷ Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1994), h. 53, <https://www.google.com/search?q=konflik+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8> (diakses tanggal 15 Oktober 2015).

antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) yang relatif terbatas.

Webster berpendapat bahwa istilah “*conflict*” didalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan”, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Akan tetapi, arti kata tersebut kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain”. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga mnyentuh aspek psikologis dibalik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri.¹⁸

Konflik dan kekerasan merupakan dua hal yang berbeda. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Sedangkan kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, sebagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.¹⁹

¹⁸ Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, *Social Conflict, terj.*, Helly P. Soetjipto, Sri Mulyantini Soetjipto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2004, h. 9.

¹⁹ Simon Fisher, *et al.*, *Op. Cit.*

b. Bentuk dan Tipe Konflik

Konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yakni:

1. Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: konflik destruktif dan konflik konstruktif. *Konflik destruktif* merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik di Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya. Sedangkan *konflik konstruktif* merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.²⁰
2. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, yaitu konflik vertikal, merupakan konflik antar komponen masyarakat didalam satu struktur yang memiliki hierarki. Konflik horizontal, merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki

²⁰ Robert H. Lauer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 98, <https://www.google.com/search?q=konflik+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8> (diakses tanggal 15 Oktober 2015).

kedudukan yang relatif sama. Dan konflik diagonal, merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumberdaya keseluruhan organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim.²¹

c. Penyebab Konflik

Suatu konflik dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik adalah sebagai berikut:²²

- a. *Teori hubungan masyarakat.* Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya.
- b. *Teori negosiasi prinsip.* Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami

²¹ Kusnadi, *Masalah Kerjasama, Konflik dan Kinerja* (Malang: Taroda, 2002), h. 67, <https://www.google.com/search?q=konflik+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8> (diakses tanggal 15 Oktober 2015).

²² Simon Fisher, *et al.*, *Op. Cit.*, h. 8-9.

konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka dari pada posisi tertentu yang sudah tetap, serta melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua belah pihak.

- c. *Teori kebutuhan manusia.* Teori ini berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia baik itu fisik, mental, dan sosial, yang tidak terpengaruhi atau dihalangi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, serta agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.
- d. *Teori identitas.* Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan

ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi diantara mereka, serta meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

- e. *Teori kesalahpahaman antar budaya.* Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain, mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain, dan meningkatkan keefektifan komunikasi antara budaya.
- f. *Teori transformasi konflik.* Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi, meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang diantara pihak-pihak yang mengalami konflik, serta mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan.

d. Tahap Konflik

Terdapat empat tahapan yang dilalui konflik, dengan urutan eskalasi, yaitu diskusi, polarisasi, segregasi, dan destruksi.²³ Tahap diskusi merupakan tahap dimana terdapat perbedaan pendapat antara pihak-pihak, namun masih cukup dekat untuk bekerja bersama. Komunikasi diharapkan berupa perdebatan langsung dan diskusi antara kedua pihak. Persepsi mengenai masing-masing pihak lawan akurat dan cukup baik. Hubungan antara kedua belah pihak diwarnai dengan kepercayaan dan saling menghargai. Isu-isu yang ditekankan dalam petikaian adalah isu substansif dan obyektif. Kemungkinan hasilnya diasumsikan mampu memuaskan kedua belah pihak: *sama-sama menang*.

Tahap kedua ialah tahap polarisasi, merupakan tahap dimana kedua pihak mulai memberikan jarak, menarik diri, dan menjauh satu sama lain. Karena jarak tersebut, komunikasi mulai tidak langsung dan bergantung kepada interpretasi (atau malah misinterpretasi). Persepsi mengenai pihak lainnya mengeras menjadi stereotip yang kaku, karena tidak ada tantangan dari fakta yang muncul dari interaksi langsung. Hubungan memburuk menjadi hubungan yang saling menghormati menjadi lebih dingin, ketika semua pihak tak lagi memandang pihak lain

²³ Petter Harris, Ben Reily, *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, terj. Lembaga Penerbit, Pendidikan dan Pengembangan Pers Mahasiswa (Jakarta: International IDEA, 2000), h. 48.

sebagai pihak yang penting, namun semakin tidak dapat diandalkan. Isu-isu yang ditekankan bukan lagi elemen yang obyektif, namun bergeser kekecemasan psikologis mengenai hubungan itu. Hasil yang mungkin bukan lagi kemenangan kedua pihak, namun harus terdapat kompromi untuk memenangkan sebagian dan kehilangan yang lainnya.

Tahap ketiga adalah tahap segregasi, yaitu kedua pihak saling menjauh dari pihak lawannya. komunikasi terbatas pada ancaman. Persepsi telah menguat menjadi gambaran “kita sebagai yang baik dan mereka sebagai yang jahat”. Hubungannya diwarnai ketidakpercayaan dan tidak saling menghargai. Isu yang ditekankan dalam pertikaian adalah kepentingan dan nilai utama setiap kelompok.

Sedangkan tahap terakhir ialah destruksi, yakni tahap permusuhan yang sepenuhnya. Komunikasi kini hanya terdiri dari kekerasan langsung atau sama sekali tanpa hubungan. Untuk menjustifikasi kekerasan, persepsi mengenai pihak lain menjadi penjelasan yang memojokkan mengenai pihak lawan sebagai bukan manusia, psikopat atau lainnya. Hubungannya berada pada kondisi tanpa harapan. Isu yang ditekankan kini hanyalah keselamatan suatu pihak terhadap agresi pihak lainnya. Kemungkinan hasil yang dipersepsikan bagi semuanya adalah sama-sama kalah.

e. Dampak Terjadinya Konflik

Konflik yang terjadi tidak selalu menimbulkan dampak yang negatif, tetapi konflik juga dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Adapun dampak yang dapat ditimbulkan oleh konflik adalah sebagai berikut:

1. Dampak positif

Pruitt dan Rubin²⁴ menyebutkan tiga dampak positif dari adanya konflik, yaitu:

- a. Konflik adalah persemaian yang subur bagi terjadinya perubahan sosial. Orang yang menganggap situasi yang dihadapinya tidak adil atau menganggap bahwa kebijakan yang berlaku saat ini tolol biasanya mengalami pertentangan dengan aturan yang berlaku sebelumnya.
- b. Konflik memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. Kebanyakan konflik tidak berakhir dengan kemenangan disalah satu pihak dan kekalahan dipihak lainnya, akan tetapi memunculkan kesepakatan yang bersifat integritas diantara kedua belah pihak.
- c. Konflik dapat mempererat persatuan kelompok. Tanpa adanya kapasitas perubahan sosial atau rekonsiliasi atas kepentingan individual yang berbeda, maka solidaritas antar kelompok

²⁴ Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, *Op. Cit.*, h. 14.

tampaknya akan merosot, dengan membawa serta efektifitas kelompok dan kenikmatan pengalaman berkelompok.

2. Dampak Negatif

Selanjutnya, Pruitt dan Rubin menyebutkan lima dampak negatif dari adanya konflik:²⁵

Pertama, taktik contentious yang pada awalnya relatif ringan, bersahabat, dan tidak bersifat ofensif, cenderung membuka jalan bagi tindakan yang lebih berat. *Kedua*, jumlah masalah yang timbul didalam konflik meningkat. *Ketiga*, fokus yang awalnya hanya bersifat khusus dapat melebar dan menjadi bersifat lebih global. *Keempat*, motivasi didalam konflik yang mengalami eskalasi beranjak dari kepentingan awal salah satu pihak untuk mendapatkan yang terbaik, yang kemudian berkembang kearah penyerangan terhadap pihak lain dan (pada akhirnya) ke arah memastikan diri bahwa pihak yang lebih menderita dari pada dirinya. *Kelima*, jumlah pihak yang berkonflik cenderung meningkat.

f. Mengatasi Konflik

Konflik antar perorangan dan konflik antar kelompok perlu diatasi demi terciptanya perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut beberapa langkah dalam mengatasi konflik, yaitu:

²⁵ *Ibid.*, h. 16-17.

Pertama, menggunakan kekuasaan dalam rangka mencegah konflik yang terjadi menyebar ke daerah lain. Kekuasaan ini harus berdasarkan tindakan yang bijak dan tidak dipengaruhi oleh motif yang emosional. *Kedua*, memperlancar usaha kedua belah pihak untuk menurunkan ketegangan melalui cara-cara diplomatis. *Ketiga*, upaya menghindari, itulah watak manusia untuk menghindari konflik sesudahnya yang berkepanjangan.²⁶

Menurut Nasikun²⁷, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada enam, yaitu:

a. Konsoliasi (*Conciliation*)

Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.

b. Mediasi (*Mediation*)

Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-

²⁶ Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), *Konflik Komunal Saat ini di Indonesia* (Jakarta, 2003), h. 28-29.

²⁷ Nasikun, *Sumber Sosial Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 25, <https://www.google.com/search?q=konflik+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8> (diakses tanggal 15 Oktober 2015).

nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

- c. Arbitrasi berasal dari kata latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan ini, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi.

- d. Perwasitan

Dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

1.5.2. Perilaku Politik

Untuk memahami dinamika politik suatu negara, Sitepu mengungkapkan beberapa teori sebagai berikut:

“*Pertama*, adalah teori sistem yang mengemukakan pranata-pranata sosial politik merupakan wadah untuk memahami dinamika kehidupan politik masyarakat. *Kedua*, teori **perilaku politik** yang mengungkapkan bahwa mengamati dinamika kehidupan politik

masyarakat, tidak cukup dengan melihat pranata sosial politik formal saja, tetapi individu-individu yang bersangkutan. Sedangkan teori kelompok adalah teori terakhir yang menjelaskan bahwa kristalografi yang ada dalam masyarakat ikut menentukan kehidupan politik masyarakat dan negara”.²⁸

Sejalan dengan Sitepu, Eulau²⁹ menyebutkan bahwa:

“Tiap individu mempunyai peranan yang berbeda, bila terdapat dalam konteks yang berbeda, hal ini dapat menjelaskan keragaman tingkah laku politik mereka. Jadi sikap, pemikiran, dan perilaku pribadi harus dijelaskan dari segi peranan individu tersebut.”

Selanjutnya, Sastroatmodjo³⁰ menjelaskan bahwa:

“Perilaku politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah dan antar kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik.

²⁸ Putra Kurniadi, *Perilaku Politik Elit Politik Lokal pada Pemilukada Kota Tanjung Pinang “Studi Kasus di Kelurahan Sei-Jang Kecamatan Bukit Bestari”*, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:r9_3PLBwhNkJ:jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/PUTRA_KURNIADI_080565201039_JURNAL.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk (Akses 14 Oktober 2015).

²⁹ Ibid., h. 10.

³⁰ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* (Semarang, Ikip Semarang Press), 1995, h. 2.

Kajian mengenai perilaku politik dapat dilakukan dengan tiga unit dasar analisis, yaitu individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. yang dimaksud dengan agregasi politik adalah kelompok individu yang tergabung dalam suatu organisasi seperti partai politik, kelompok kepentingan, birokrasi dan lembaga-lembaga pemerintahan. Tipologi kepribadian politik adalah tipe-tipe kepribadian pemimpin seperti pemimpin otoriter, pemimpin demokratis, dan *leissfeir*.

Untuk memahami perilaku politik secara lebih mendalam, maka perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku politik itu sendiri. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik aktor politik, yaitu:

1. Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media masa.
2. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. Lingkungan sosial politik langsung itu memberikan bentuk-bentuk sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat pada aktor politik, serta memberikan pengalaman-pengalaman hidup.
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Terdapat tiga basis fungsional sikap dalam memahami struktur kepribadian,

yaitu kepentingan, penyesuaian diri, dan eksternalisasi diri dan pertahanan diri.

4. Lingkungan politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, kehadiran seseorang, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman dalam segala bentuknya.

Perilaku politik sangat erat kaitannya dengan sikap politik. Menurut Mar'at sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap obyek tersebut. Sedangkan Sastroatmodjo berpendapat bahwa sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas akan tetapi baru merupakan kecenderungan atau pre-disposisi.

Keterkaitan antara studi perilaku politik dengan studi sikap politik disampaikan oleh Gordon Marshall yang menyebutkan bahwa:³¹

“The study of political behaviour also embraces the study of inactifity and apathy, as well as the attitudes as basis of participation and non participation in the political sphere”.

³¹ Khiruddin, *Perubahan Perilaku Politik Masyarakat: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, 1997), h. 49.

Perilaku dan sikap politik mempunyai keterkaitan yang erat juga dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Dimana salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku politik adalah struktur kepribadian atau sikap.

Selanjutnya, beberapa ilmuwan politik seperti Gabriel Almond, Sydney Verba, dan Bingham Powell, berpendapat bahwa sikap politik identik dengan orientasi politik. Orientasi politik tersebut meliputi tiga aspek, yakni kognisi, afeksi, dan evaluasi. Aspek kognitif merupakan aspek yang menyangkut pengetahuan tentang politik, kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya. Aspek afektif merupakan komponen yang meliputi perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilannya. Sedangkan aspek evaluatif, yakni komponen yang meliputi keputusan dan praduga tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Bagi Almond dan Powell, orientasi-orientasi politik inilah yang kemudian mengarah kepada perilaku politik tertentu, sebagaimana mereka mengatakan bahwa:

“They (political orientation) constitute the latent political tendencies, the propensities for political behaviour, to which we have referred, and as such they are of great importance in explaining and predicting political actions”.

Disamping perilaku politik, seperti yang telah dijelaskan diatas, ada istilah lain namun hampir memiliki arti yang sama yaitu partisipasi politik. Partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya.³²

Milbrath dan Goel selanjutnya membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori, yaitu:³³

- a. Apatitis yaitu orang yang menarik diri dari proses politik. Apatitis (masa bodoh) dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala. Adapun ciri-ciri apatis antara lain ketidakmampuan untuk mengakui tanggungjawab pribadi, untuk menyelidiki, atau untuk menerima emosi dan perasaan sendiri, yaitu perasaan samar-samar dan tak dapat dipahami, rasa susah, tidak aman dan merasa terancam, menerima secara mutlak tanpa tantangan otoritas nilai-nilai konvensional, membentuk suatu pola yang cocok dengan diri sendiri, yang dalam situasi klinis disebut kapasifan.
- b. Spektator merupakan orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut dalam pemilihan umum. Partisipasi spektator lebih dikenal sebagai partisipasi pasif. Partisipasi ini bisa dilihat dari tindakan yang

³² *Ibid.*, h. 7.

³³ *Ibid.*, h. 74.

merasa tidak tahu ataupun tidak mampu melakukan kegiatan-kegiatan politik politik tersebut.³⁴

- c. Gladiator yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. Partisipasi ini secara aktif terlibat dalam proses politik baik dalam bentuk pendidikan pemilih maupun pemantauan sejak pra-pemilihan sampai pelaksanaan kebijakan publik sebagai hasil dari sebuah proses politik. Bukan hanya berhenti pada sistem proyek dengan timing yang terbatas, namun juga dengan sungguh-sungguh membangun komunitas yang sadar politik dan selalu berusaha menanamkan pengaruh dalam masyarakat.³⁵
- d. Pengritik ialah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Partisipasi politik dalam arti non-konvensional mencakup berbagai kegiatan yang cenderung melibatkan banyak orang dalam suatu bentuk kelompok massa dan kadang disertai dengan pelanggaran tertib hukum, dan kekerasan.

³⁴Muhammad Agus Prianto, *Perilaku politik elit Muhammadiyah pada pemilihan kepala daerah kalimantan tengah tahun 2010* (Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011), h. 21.

³⁵ *Ibid.*

Terkait dengan partisipasi apatis, Rosenberg menyebutkan tiga alasan adanya perilaku apatis. *Pertama*, individu memandang bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa aspek kehidupannya. Ia beranggapan bahwa mengikuti kegiatan politik dapat merusak hubungan sosial dengan lawannya dan dengan pekerjaannya, karena kedekatannya dengan partai-partai politik tertentu. *Kedua*, menganggap bahwa aktivitas politik merupakan kegiatan yang sia-sia belaka. Individu beranggapan bahwa ia tidak akan mungkin dapat mengubah keadaan dan melakukan kontrol politik. Dalam pandangannya, justru terjadi *gap* yang dalam antara cita-cita dan realisasinya yang tak ada seorangpun yang dapat menjembatannya. *Ketiga*, ketidakadaan pesaing politik yang didasarkan atas pemikiran bahwa buah pikiran politik itu tidak menarik baginya dan menganggap bahwa politik hanyalah memberikan kepuasan sedikit dan tak langsung, sedang hasil langsung yang diterimanya sangat sedikit.³⁶

Selain apatis, beberapa julukan lain yang diberikan kepada orang-orang yang tidak ikut serta dalam politik yaitu sinis, alienasi (terasing), dan anomie (terpisah). Ager mengartikan sinisme sebagai “kecurigaan yang busuk dari manusia”, dengan ciri-ciri seperti perasaan bahwa politik itu adalah urusan yang kotor, politik tidak dapat dipercaya, individu dijadikan bulan-bulanan dari orang yang melakukan

³⁶ Sudijono Sastroatmodjo, Op. Cit., h. 75.

manipulasi, kekuasaan “sebenarnya” dilaksanakan oleh orang-orang “tanpa muka”.³⁷

Sikap alienasi merupakan orang-orang yang menganggap pemerintahan sebagai keberadaan yang tidak ada artinya serta tidak memberikan konsekuensi terhadap mereka. Sedangkan sikap anomie oleh Lane diungkapkan sebagai “suatu perasaan kehidupan nilai dan ketiadaan awal” dengan kondisi seorang individu mengalami perasaan ketidakefektifan dan bahwa para penguasa bersikap “tidak peduli” yang merupakan devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak.

1.5.3. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjelaskan bahwa Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Menurut Ryker, dalam *Heyzer, Ryker and Quizon*³⁸, Ormas/LSM atau yang lebih dikenal dengan Organisasi non Pemerintah (*Non*

³⁷ *Ibid.*, h. 76.

Government Organizaton) merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan yang bersifat mandiri. Organisasi seperti ini tidak menggantungkan diri pada pemerintah, pada negara, terutama dalam dukungan finansial dan sarana/prasarana. Sekalipun mendapat dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional, tidak berarti kalangan NGO/LSM sama sekali terlepas dari pemerintah, karena tidak jarang pemerintah memberikan fasilitas penopang, misalnya dengan adanya pembebasan pajak untuk aktifitas dan aset yang dimiliki NGO.

Pasal 5 dalam undang-undang Ormas menyebutkan secara rinci tujuan dibentuknya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), antara lain: (1) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, (2) Memberikan Pelayanan kepada masyarakat, (3) Menjaga nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (4) Melestarikan dan memelihara norma, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, (5) Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, (6) Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan masyarakat, (7) Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, (8) mewujudkan tujuan negara.

³⁸ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 200.

Selanjutnya, pasal 6 menyebutkan beberapa fungsi ormas yaitu: (a) Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota/atau tujuan organisasi, (b) Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, (c) Pengalir aspirasi masyarakat, (d) Pemberdayaan masyarakat, (e) Pemenuhan pelayanan sosial, (f) Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, (g) Pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Noeleen Heyzer (dalam Heyzer, Ryker, and Quizon)³⁹ mengidentifikasi tiga jenis peranan yang dapat dimainkan oleh NGO, yaitu:

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “grassroots” yang sangat esensial, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerjasama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.
3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

³⁹ *Ibid.*, h. 203.

Sementara itu, Andara L. Corrothers dan Estie W. Suryatna (dalam *Tadashi Yamamoto*)⁴⁰, mengungkapkan hal yang hampir sama dengan Heyzer, dengan sedikit menekankan pada dimensi politik. Mereka mengidentifikasi empat peranan yang dapat dimainkan oleh kalangan NGO dalam sebuah negara, antara lain:

- a. *Katalisasi perubahan sistem.* Hal ini dilakukan dengan jalan mengangkat sejumlah masalah yang penting dalam masyarakat, membentuk sebuah kesadaran global, melakukan advokasi demi perubahan kebijaksanaan negara, mengembangkan kemauan politik rakyat, dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif masyarakat.
- b. *Memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara, bahkan bila perlu melakukan protes.*
- c. *Memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga peradilan.* Hal ini dilakukan karena tidak jarang warga masyarakat menjadi korban kekerasan. Kalangan NGO muncul secara aktif untuk melakukan pembelaan bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan.
- d. *Implementasi program pelayanan.* NGO menenpatkan diri sebagai lembagayang mewujudkan sejumlah program dalam masyarakat.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 204.

Dari beberapa peran diatas, Afan Gaffar⁴¹ kemudian menggolongkan peranan NGO kedalam dua kelompok besar: *pertama*, peranan dalam bidang non-politik yaitu memberdayakan masyarakat dalam bidang sosial-ekonomi, dan *kedua*, peranan dalam bidang politik, yaitu sebagai wahana untuk menjembatani warga masyarakat dengan negara atau pemerintah.

1.6. DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual merupakan suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep dengan konsep yang lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman atau kerancuan. Konsep adalah definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala yang dimaksud, atau konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik kejadian. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konflik

Konflik adalah sebuah keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang berjuang untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dengan tujuan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan lawan pesaingnya.

⁴¹ *Ibid.*

2. Perilaku Politik

Perilaku politik merupakan pola interaksi antara aktor-aktor politik baik itu pemerintah maupun masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik.

3. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

1.7. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan suatu petunjuk tentang bagaimana suatu variabel itu diukur. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konflik merupakan variabel independen (bebas) yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi penyebab timbulnya atau adanya perubahan pada variabel dependen (terikat). Indikator-indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel independen ini meliputi:

a. Bentuk konflik

(1) Berdasarkan sifat

Konflik deskruktif, disebabkan adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari diri seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain.

Konflik konstruktif, disebabkan adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan.

(2) Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik

Konflik Vertikal, terjadi antar komponen masyarakat didalam suatu struktur yang memiliki hierarki.

Konflik horizontal, terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama.

Konflik diagonal, terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya.

b. Dampak Konflik

(1) Dampak positif, meliputi: adanya persemaian yang subur bagi terjadinya perubahan sosial, memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan, mempererat persatuan kelompok.

(2) Dampak negatif, meliputi: semakin melebarnya konflik, jumlah masalah yang timbul semakin meningkat, motivasi konflik yang beranjak dari kepentingan salah satu pihak kemudian berarah kepenyerangan, jumlah pihak yang berkonflik cenderung meningkat.

2. Perilaku Politik merupakan variabel dependen (terikat) yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Perilaku politik diukur melalui:

a. Perilaku apatis, dengan indikator-indikator:

- Ketidakperdulian terhadap situasi politik yang sedang terjadi
- Menarik diri dari proses politik atau tidak menghiraukan sama sekali masalah politik
- Ketidakpercayaan terhadap politik dan pemerintah

b. Perilaku spektator, dengan indikator-indikator:

- Mengetahui proses dan situasi politik yang terjadi
- Lebih merasa tidak terlibat langsung dalam suatu proses atau masuk kedalam situasi politik yang terjadi
- Dimungkinkan pula terlibat dalam suatu proses atau masuk kedalam situasi politik, tetapi tidak tampil langsung atau tidak muncul kepermukaan.

c. Perilaku gladiator, dengan indikator-indikator:

- Aktif dan terlibat langsung dalam proses dan situasi politik secara terbuka
- Mempunyai respon yang kuat terhadap proses politik
- Secara terbuka berupaya mempengaruhi untuk mendapatkan simpati
- Memposisikan diri sebagai individu yang mengharuskan adanya partisipasi politik yang luas.

d. Perilaku pengkritik, dengan indikator-indikator:

- Tahu tentang adanya suatu proses politik
- Tahu akan situasi politik yang sedang terjadi
- Tidak terjun langsung dalam proses politik dan tidak masuk kedalam suatu keadaan situasi politik.
- Merespon suatu proses politik dan situasi politik dengan hanya melakukan kritik atau memberikan pandangan politiknya.

1.8. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Terdapat dua hipotesis penelitian, yakni:

1. Ha (Hipotesis kerja) menyatakan hubungan antara variabel X dan variabel Y, atau adanya perbedaan antara dua kelompok.

Rumusan Ha:

Konflik Nahdlatul Wathan (variabel X) memiliki pengaruh terhadap perilaku politik masyarakat (variabel Y).

2. Ho (Hipotesis Nol atau nihil) menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel, atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Rumusan Ho:

Konflik Nahdlatul Wathan (variabel X) tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku politik masyarakat (variabel Y).

1.9. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional, empiris, dan sistematis*.⁴² Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamatai oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian yang bersifat logis. Dalam hal ini metode penelitian terdiri dari:

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kuantitatif diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2.

yang telah ditentukan.⁴³ Sedangkan studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan.⁴⁴

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur dengan studi kasus di desa Pancor Kecamatan Selong, dan di desa Anjani Kecamatan Suralaga. Kedua desa ini merupakan pusat konflik dan pusat perkembangan Nahdlatul Wathan saat ini, dimana kubu Rauhun (R1) di Pancor dan kubu Raihanun (R2) di Anjani.

1.9.3. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik

⁴³ Ibid., h. 7.

⁴⁴ Yani Kusmarni, Studi Kasus John W. Creswell, diakses melalui file.upi.edu/Direktori/.../Laporan_Studi_Kasus.pdf, tanggal 19 November 2015.

kesimpulan. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di desa Pancor dan Anjani Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah penduduk, yakni 16.111 di desa Pancor dan 10.078 di desa Anjani.⁴⁵ Populasi tersebut masih sangat luas, sehingga harus disederhakan dengan sampel yang dapat mewakili populasi tersebut.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*, yakni pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhitungkan stara yang ada dalam populasi itu. Adapun penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Frank Lynch, yaitu:

$$n = \frac{N Z^2 \times P (1 - P)}{N d^2 + Z^2 \times P (1 - P)}$$

⁴⁵ Lombok Timur dalam angka 2015, diakses melalui lomboktimurkab.bps.go.id/ tanggal 1 November 2015.

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

Z = Nilai Normal Variabel (1,96)

P = Harga Patokan Terbatas (0,50)

d = Kekeliruan Pengambilan Sampel (0,10)

a. Sampel di Desa Pancor

$$n = \frac{16.836 \cdot (1,96)^2 \times 0,50 (1 - 0,50)}{16.836 \cdot (0,10)^2 + (1,96)^2 \times 0,50 (1 - 0,50)}$$

$$n = \frac{16.836 \times 3,84 \times 0,25}{(16.836 \cdot 0,01) + (3,84 \cdot 0,25)}$$

$$n = \frac{16.162,56}{169,32}$$

n = 95,45 dibulatkan menjadi (95)

b. Sampel di Desa Anjani

$$n = \frac{10.328 \cdot (1,96)^2 \times 0,50 (1 - 0,50)}{10.328 \cdot (0,10)^2 + (1,96)^2 \times 0,50 (1 - 0,50)}$$

$$n = \frac{10.328 \times 3,84 \times 0,25}{(10.328 \cdot 0,01) + (3,84 \cdot 0,25)}$$

$$n = \frac{9.912,88}{104,24}$$

n = 95,11 di bilatkan menjadi (95)

Dari hasil perhitungan diatas, jumlah sampel di desa Pancor adalah 95 sampel, dan didesa Anjani sebanyak 95 sampel. Jumlah sampel secara keseluruhan ialah 190 sampel.

1.9.4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, yaitu jawaban dari responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuisisioner maupun wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi kedua yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder bisa didapatkan dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal, koran, internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner, wawancara dan studi pustaka. Ketiga teknik ini dilakukan secara bersama-sama dengan penjelasan, bahwa semua data utama dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner. Namun apabila ada beberapa hal yang membutuhkan penjelasan sumber data secara khusus,

maka pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka.

a. Kuisisioner

Kuesioner penulis buat baik yang berasal dari variabel independen maupun variabel dependen yang diuraikan menjadi instrumen lalu pada akhirnya menjadi kuesioner.

b. Studi Literatur/Kajian Pustaka

Mempelajari buku-buku dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisi data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan.⁴⁶ Dengan demikian, teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik dengan memanfaatkan *software* SPSS.

⁴⁶ Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 147.